

**PENGARUH SISTEM INFORMASI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN
TEMUAN PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI AUDIT (LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2019-2023 SE-PROVINSI XYZ)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: MARYANTO EKO HARTANTO

NIM : 126232155

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH SISTEM INFORMASI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN
TEMUAN PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI AUDIT (LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2019-2023 SE-PROVINSI XYZ)**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: MARYANTO EKO HARTANTO

NIM : 126232155

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAN EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**PENGARUH SISTEM INFORMASI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN
TEMUAN PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI AUDIT (LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TA 2019-2023 SE-PROVINSI XYZ)**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Maryanto Eko Hartanto
126232155

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP

ABSTRAK

Desentralisasi memberikan ruang kendali lebih bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola urusan-urusan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Atas kewenangan yang diberikan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat dilihat dari opini laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi, pengendalian internal dan temuan pemeriksaan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan struktur data panel dari 23 pemerintah daerah se-Provinsi XYZ selama lima tahun (2019-2023). Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa sistem informasi, pengendalian internal dan temuan pemeriksaan secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: sistem informasi, pengendalian internal, temuan pemeriksaan dan opini laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

Decentralization provides more control space for Regional Governments to manage affairs given by the Central Government. With the authority given, Regional Governments have an obligation to be accountable for the implementation of these tasks. One form of accountability is the Regional Government Financial Report. Transparent and accountable regional financial management can be seen from the opinion of the regional government's financial report. This study aims to empirically prove the influence of information systems, internal control and audit findings on the opinion of regional government financial reports. This study uses a panel data structure from 23 regional governments in XYZ Province for five years (2019-2023). The results of statistical tests show that information systems, internal control and audit findings partially or together have an influence on the opinion of regional government financial reports.

Keywords: *information systems, internal control, audit findings and opinions on regional government financial reports.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendhahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., Msi., Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan di PPAk FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya serta membantu selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan rekan kerja di Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Penulis mengucapkan permohonan maaf jika masih terdapat kekurangan. Akhir kata, Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan.

Denpasar, 8 November 2024

Maryanto Eko Hartanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Sistem Informasi.....	6
2.2. Pengendalian Internal	7
2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.4. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.5. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	14
2.6. Penelitian Terdahulu	15
2.7. Kerangka Penelitian	19
2.8. Hipotesis	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Disain Penelitian.....	23
3.2. Jenis Penelitian	23
3.3. Populasi dan Sampel	23
3.4. Jenis dan Sumber Data	24
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	25
3.7. Metode Analisis Data.....	28
3.7.1. Statistik Deskriptif	28

3.7.2. Uji Asumsi Klasik	28
3.7.3. Analisis Regresi Data Panel.....	32
3.7.4. Uji Statistik F.....	35
3.7.5. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	35
3.7.6. Uji Statistik t (Uji Parsial)	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Deskripsi Data	37
4.2. Uji Asumsi Klasik.....	38
4.2.1. Normalitas	38
4.2.2. Multikolinearitas.....	40
4.2.3. Heteroskedastisitas	41
4.2.4. Autokorelasi	43
4.3. Analisis Regresi Berganda.....	43
4.3.1. Uji Koefisiensi Determinasi	45
4.3.2. Uji Statistik-F	45
4.3.3. Uji Statistik t.....	46
4.4. Pembahasan	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1. Simpulan.....	50
5.2. Saran	50
REFERENSI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Temuan dan Opini LKPD se-Provinsi XYZ TA 2019-2023	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1	Opini LKPD	28
Tabel 3.2	Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi.....	32
Tabel 4.1	Deskriptif Statistik	37
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas Secara Statistik.....	40
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolienearitas	41
Tabel 4.4	Hasil Uji Heterokedastisitas	42
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	43
Tabel 4.6	Analisis Regresi Linier Berganda	44
Tabel 4.7	Koefisiensi Determinasi	45
Tabel 4.8	Hasi Ujian Statistik F (Simultan)	46
Tabel 4.9	Hasi Ujian Statistik T (Parsial).....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	19
Gambar 3.1 Kurva Dubin Watson	32
Gambar 4.1 Grafik Hasil Uji Normalitas Data	38
Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas Data	39
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dua undang-undang yang pertama kali mendesentralisasikan kekuasaan di Indonesia dan membentuk pemerintah daerah. Sebagai langkah lebih lanjut menuju desentralisasi di bidang pemerintahan, kedua undang-undang ini menetapkan sistem di mana pemerintah memberikan kekuasaan khusus kepada daerah otonom sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

Inisiatif desentralisasi muncul sebagai tanggapan atas keinginan daerah untuk mendapatkan otonomi pembangunan yang lebih besar. Baik UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah direvisi lebih lanjut. Terakhir, ketentuan pemerintah daerah direvisi dengan Komitmen pemerintah atas dukungan terhadap desentralisasi tercermin dalam perkembangan peraturan sebagaimana disebutkan.

Dengan perkembangan zaman saat ini, sejak kebijakan desentralisasi diterapkan, pemerintah pusat dan daerah terus berbenah agar dapat memberikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kepada masyarakat di daerah. Berbagai proses kebijakan dan birokrasi dipangkas menjadi lebih efisien sebagaimana dituangkan dalam rencana jangka panjang dan menengah pemerintah. Namun demikian, isu terkait pengelolaan anggaran dan realisasi belanja daerah masih menjadi isu yang strategis yang dihadapi pemerintah Indonesia.

Sebagai hasil dari otonomi daerah, pemerintah daerah dianggap lebih bertanggung jawab atas layanan masyarakat dan pembangunan daerah. Karena kebutuhan krusial akan kontrol lokal ini, desentralisasi sangat erat kaitannya dengan hal tersebut.

Menurut Glosarium Bank Dunia, desentralisasi didefinisikan sebagai proses pemindahan wewenang dan kontrol ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem, atau program untuk menangani tugas-tugas manajemen yang

lebih khusus atau umum. Menurut rencana desentralisasi, pemerintah federal memberikan sejumlah wewenang kepada negara bagian dan daerah, yang kemudian dapat menggunakan wewenang tersebut sesuai dengan keinginan mereka, dalam batas-batas institusi mereka sendiri dan aturan serta regulasi yang berlaku untuk mereka. Menurut Harun (2015), desentralisasi merupakan elemen penting dalam definisi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menurut Bank Dunia. Bank Dunia mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai manajemen pembangunan yang kuat, bertanggung jawab, berbasis demokratis, dan efisien secara ekonomi. Iklim politik dan hukum yang ramah terhadap kegiatan bisnis, bebas dari korupsi, dan bebas dari kesalahan alokasi dana adalah beberapa dari tujuan ini. Minimnya korupsi, kerangka hukum yang dapat diprediksi, partisipasi pemerintah, daya tanggap, akuntabilitas, dan transparansi dalam semua aspek tata kelola pemerintahan merupakan karakteristik yang menurut Agere dalam Mimba (2007) merupakan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah tidak hanya dapat membuat keputusan, tetapi mereka juga diharuskan untuk mengungkapkan keputusan tersebut dalam laporan keuangan mereka. Sejumlah peraturan perundang-undangan berlaku untuk laporan-laporan ini, termasuk yang berkaitan dengan keuangan negara (No. 17 tahun 2003), perbendaharaan negara (No. 1 tahun 2004), pengelolaan keuangan daerah (PP No. 58 tahun 2005), standar akuntansi pemerintah (SAP) (PP No. 71 tahun 2010), dan perubahan kedua atas pedoman pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 tahun 2011 atas Permendagri No. 13 tahun 2006).

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, ukuran-ukuran normatif kualitas laporan keuangan diperlukan agar informasi akuntansi dapat memenuhi tujuannya, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal ini sependapat dengan pendapat Obeidat (2007) yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan hanya dapat memperoleh manfaat dari laporan keuangan jika data yang disajikan relevan, dapat dipercaya, dan mudah dipahami. Jika Anda ingin laporan keuangan Anda lulus uji kualitas ini, Anda perlu memastikan bahwa laporan keuangan Anda mengikuti *General Accepted Accounting Principles* (GAAP).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditugaskan untuk memeriksa ekuitas LKPD sesuai dengan mandat utamanya berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 (Tentang BPK) dan UU No. 15 Tahun 2004 (Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Dalam rangka pelaksanaan APBD dalam satu tahun anggaran, LKPD memberikan pertanggungjawaban kepada kepala daerah - dalam hal ini gubernur, bupati, atau walikota. Bagian dari pemeriksaan keuangan BPK adalah pemeriksaan atas LKPD, dan tujuannya adalah untuk menentukan seberapa logis informasi yang disajikan dalam LKPD. Menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini adalah penilaian profesional pemeriksa keuangan atas kredibilitas laporan keuangan. Jika LKPD dapat diandalkan, maka opini audit akan menunjukkan hal tersebut. Jika LKPD memiliki pandangan positif, maka LKPD tersebut dapat dipercaya. Untuk audit LKPD, biasanya ada empat kemungkinan hasil: opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), atau tidak memberikan pendapat (TMP/Disclaimer).

Seberapa andal LKPD bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yang kompeten. Anggaran daerah yang dikelola dengan baik harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, hemat biaya, terbuka dan jujur kepada publik, serta mengelola sumber daya secara adil dengan tetap mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat (PP Nomor 58 Tahun 2005). Kesalahan akuntansi, baik yang disengaja maupun tidak, tidak dapat dihindari dalam sistem informasi. Selain itu, kredibilitas laporan keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Dengan kata lain, pengendalian intern sangat penting bagi sistem akuntansi, atau paling tidak sistem akuntansi sangat terkait dengannya.

Tabel berikut ini menampilkan hasil pemeriksaan LKPD di Provinsi XYZ dari TA 2019 sampai dengan 2023, sesuai dengan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi XYZ.

Tabel 1.1 Jumlah Temuan dan Opini LKPD
se-Provinsi XYZ TA 2019-2023

Tahun	Jumlah	Opini LKPD			
	Temuan Pemeriksaan	WTP	WDP	TW	TMP
2019	210	12	11	0	0
2020	203	19	4	0	0
2021	230	22	1	0	0
2022	259	23	0	0	0
2023	238	23	0	0	0

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI (<https://www.bpk.go.id/ihps>)

Data ini menunjukkan bahwa audit menemukan rata-rata 228 kejadian setiap tahunnya. Rosalin (2011), salah satu penelitian terdahulu yang meneliti opini laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan dan opini. Komitmen organisasi, pemanfaatan TI, kualitas SDM, dan pengendalian akuntansi internal adalah beberapa karakteristik yang telah dieksplorasi. Selain itu, diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia bukanlah faktor kunci dalam bagaimana laporan keuangan terlihat, tetapi pemanfaatan teknologi, pengendalian akuntansi internal, dan pengabdian organisasi. Temuan dari audit BPK tidak selalu mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah (Parwanto, 2017). Opini audit yang berwawasan luas dan penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Iswanto (2013) menemukan bahwa keandalan laporan keuangan berkorelasi positif dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, keandalan laporan keuangan berkorelasi negatif dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan keandalan laporan keuangan juga berkorelasi negatif dengan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berusaha untuk memastikan apakah hasil pemeriksaan dan sistem informasi mempengaruhi penilaian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Dari Tahun Anggaran 2019-2024, penelitian ini hanya akan mencakup pemerintah daerah di Provinsi XYZ, yang meliputi satu pemerintah provinsi, satu pemerintah kota, dan dua puluh satu pemerintah kabupaten.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah temuan pemeriksaan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem informasi dan pengendalian internal serta temuan pemeriksaan secara bersama-sama mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan pernyataan masalah sebagai titik awal, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti bahwa:

1. Kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem informasi.
2. Pengendalian internal suatu organisasi berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangannya.
3. Opini atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh hasil audit.
4. Opini laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem informasi, hasil pengendalian internal, dan pemeriksaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Implikasi Teoritis
Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi investigasi sektor publik di Indonesia di masa mendatang.
2. Implikasi Praktis
 - a. Pihak Pemerintah
Memiliki potensi untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan mereka.
 - b. Pihak Masyarakat
Berkontribusi pada pemahaman masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah mereka dengan menjadi sumber informasi yang dihormati.

REFERENSI

- Adzani, Akhmad Hafidzan dan Dwi Martani. (2014). *Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Retrieved from <https://staff.blog.ui.ac.id/martani>.
- Afrianti, Dita. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Augustine, Yvonne dan Robert Kritaung. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta. PT Dian Rakyat.
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. (2006). *Metodologi Penelitian Keuangan: Prosedur, Ide dan Kontrol*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester*. <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Dewi, Atria. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Intellectual Capital terhadap Kulaitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Ekasari, Winda. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. Retrieved from <http://www.infodiknas.com>.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Harun, Harun dan Karen Van-Peursem, Ian R.C Eggleton. (2015). *Indonesia Public Sector Accounting Reforms: Dialogic Aspirations A Step Too Far?.* Accounting, Auditing & Accountanbility Journal Vol.28 Iss. 5.
- Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, Muhammad Fakhri dan Amn Wibowo. (2000). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta. AMP YKPN.
- Iswanto. (2013). *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas lampung.

- Jailani, Muhammad Rif'an dan F.X. Kurniawan Tjakrawala. (2023). *Analysis of the Effectiveness of Internal Control on the Local Government's Financial Report in the East Lampung Regency*. International Journal of Scientific and Reseach Publication Vo.13 Issue 11 November 2023.
- Jones, Rowan dan Mauric Pendlbury. (2000). *Public Sector Accounting 5th Edition*. Prentice Hall.
- Kurnia, Dede. (2020). *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Revenue Vol 01 No.01 Agustus 2020.
- Kusumawati, Dwi dan Dwi Ratmono. (2017). *Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Diponegoro Journal of Accounting VO.6 No.1 Tahun 2017.
- Laudon, Kenneth C. dan Jane Price Laudon. (2014). *Management Information Systems Managing the Digital Firm*. 13th Edition. Pearson Education Limited.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mimba, Ni Putu S.H., Jan Van Helden dan Sandra Tillema. (2007). *Public Sector Performance Measurement in Developing Countries*. Journal of Accounting & Organizational Change Vol. 3 Iss. 3.
- Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, (2006) *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nugraha, M. T., & Tjakrawala, F. K. (2023). Analysis of Implementation of Internal Control based on COSO ERM Perspective (Case Study of PT JOY). *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(6), 146–152. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.13.06.2023.p13821>
- Obeidat, Mohemmed Ibrahim. (2007). *Accounting Information Qualitative Characteristic Gap: Evidence from Jordan*. International Management Review Vol.3 No.2.
- Parwanto, Endri dan Puji Harto. (2017). *Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting Vol.6 No.1 Tahun 2017.
- Rosalin, Faristina. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Santoso, Singgih. (2015). *Menguasai Statistik Multivariat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. (2016). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta. Ekonesia
- Taufik. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera)*. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Tjakrawala, F. X. K., & Yuni, M. (2017). *Perspektif Akuntan Publik tentang Kualitas Laporan Keuangan, Insentif bagi Manajemen, Nilai Etis, dan Pengendalian Internal dalam Menyikapi Praktek Creative Accounting*. Journal of Business Administration Vo.1 No.2 Septemver 2017.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- _____. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Wibisono, Dermawan. (2005). *Metode Penelitian & Analisis Data*. Jakarta. Salemba Medika.
- Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta. Ekonesia.
- Yusup, Maulana. (2016). *Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol.10 No.2 Oktober 2016.